**OTONOMI DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI**

Besse Nurilmi¹, Ayu Pitria Susanti², Ayu Puspita³, Rizky kurniawan⁴

Program Studi Ekonmi Syariah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: bessenurilmi03@gmail.com¹,

ayupitriya07@gmail.com²

ayupuspitaa1105@gmail.com ³

 Riskikurniawan101006@gmail.com⁴

**Abstrak :** Adanya otonomi daerah merupakan salah satu cara pemerintah mensejahterakan rakyat dimana aspirasi-aspirasi rakyat lebih cepat ditangkap sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah sesuai dengan kultur. Otonomi daerah berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia dengan memungkinkan setiap daerah mengelola sumber daya dan potensi ekonominya secara mandiri. Melalui UU No. 22 Tahun 1999, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya sendiri, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menciptakan keseimbangan tugas antara pusat dan daerah. Desentralisasi mencakup pemindahan wewenang dalam pengelolaan anggaran, pengumpulan pajak, dan penerimaan bantuan dari pemerintah pusat. Penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat meningkatkan investasi, pertumbuhan sektor swasta, dan kinerja ekonomi daerah serta membantu mengurangi ketimpangan antar wilayah jika diiringi dengan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya yang baik. Namun, dampak positifnya bervariasi antara sektor dan provinsi, dengan tata kelola pemerintahan daerah dan ketergantungan rendah pada sektor pertanian sebagai faktor penentu keberhasilan. Otonomi daerah menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi jika diimplementasikan secara efektif dan disertai dukungan memadai dari pemerintah pusat.

**Kata Kunci : Otonomi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi**

**Abstract:** The existence of regional autonomy is one way for the government to improve the welfare of the people, where people's aspirations are captured more quickly in accordance with the needs of regional communities according to culture. Regional autonomy plays an important role in Indonesia's economic development by enabling each region to manage its resources and economic potential independently. Through Law no. 22 of 1999, the central government gives freedom to regions to develop their own regions, bring services closer to the community, and create a balance of tasks between the center and regions. Decentralization includes permission to manage the budget, collect taxes, and receive assistance from the central government. Research shows that regional autonomy can increase investment, private sector growth and regional economic performance as well as help reduce inequality between regions if accompanied by community empowerment and good resource management. However, the positive impact varies between sectors and provinces, with local governance and low dependence on the agricultural sector as critical success factors. Regional autonomy is an important foundation for economic development if implemented effectively and accompanied by adequate capabilities from the central government.

**Keywords: Regional Autonomy, Economic Growth**

**PENDAHULUAN**

Otonomi Daerah di Indonesia selalu dikaitkan dengan Pasal 1 UUD l945 tentang bentuk negara dan yang kedua Pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintahan daerah. Pasal 1 ayat (1) UUD l945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik. Sedangkan Pasal 18 UUD 45 tentang Pemerintahan Daerah pada intinya menetapkan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar atau propinsi dan daerah propinsi dibagi dalam daerah–daerah yang lebih kecil. Daerah tersebut bersifat otonom dengan dibentuknya Badan Perwakilan Daerah, atau hanya berupa daerah administrasi saja. Dengan adanya daerah otonom berarti bahwa daerah itu mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tetapi harus diletakkan pada ketentuan sebelumnya, yaitu dalam kerangka negara kesatuan.[[1]](#footnote-1)

Otonomi daerah adalah sebuah kebijakan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah lokal memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik dan keunggulan komparatif daerah mereka. Ini dapat mencakup pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. [[2]](#footnote-2)

Melalui otonomi daerah, diharapkan tercipta sinergi antara kebijakan pusat dan daerah yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, implementasi otonomi daerah juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kapasitas pemerintah daerah yang bervariasi, korupsi, dan ketidakseimbangan sumber daya antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa otonomi daerah benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Otonomi daerah di Provinsi Jambi telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan kewenangan yang lebih besar, pemerintah Provinsi Jambi mampu merancang dan menerapkan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Pertumbuhan ekonomi di Jambi terlihat dari meningkatnya investasi di sektor-sektor utama seperti perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Data menunjukkan bahwa sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, menjadi motor penggerak utama perekonomian Jambi, memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi. Selain itu, sektor pertambangan, terutama batu bara, juga berperan penting dalam mendongkrak perekonomian daerah.[[3]](#footnote-3)

Pada tahun-tahun terakhir, pemerintah Jambi telah berupaya meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi. Hal ini tidak hanya memperlancar arus barang dan jasa, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan peluang ekonomi. Pemerintah daerah juga fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan sehat, yang merupakan kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.[[4]](#footnote-4)

Namun, tantangan tetap ada, seperti ketergantungan pada komoditas tertentu yang rentan terhadap fluktuasi harga global, serta isu-isu lingkungan yang timbul dari eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, pemerintah Jambi terus berupaya untuk mendiversifikasi ekonomi daerah dengan mengembangkan sektor-sektor lain seperti industri kreatif dan pariwisata. Dengan pengelolaan yang baik dan kebijakan yang tepat, otonomi daerah di Jambi memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.[[5]](#footnote-5)

**KAJIAN TEORI**

**Otonomi daerah**

Otonomi daerah yang mengacu pada regulasi yang telah penulis sebut diatas pada latar belakang dan sekarang ini telah mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 kemudian Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaandan peran serta masyarakat.[[6]](#footnote-6)

Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keaneka ragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara desentralisasi. Desentralisasi juga dimaksudkan untuk memperlancar roda pemerintahan, mengingat bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang luas, yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang besar dan kecil, serta masyarakat yang pluralistik dari segi agama, budaya dan ras atau suku serta aspek-aspek lainnya yang berbeda-beda bentuk dancoraknya, sehingga pemerintah pusat tidak mungkin dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik.[[7]](#footnote-7)

Adapun alasan-alasan sehingga desentralisasi ini dipandang sebagai asas dan sekaligus dianut dalam system penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dikemukakan pendapat The Liang Gie, sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihaksaja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagaitindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
3. Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapaisuatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untukdiurus oleh pemerintah setempat pengurusannya diserahkan kepadadaerah. Hal-hal yang lebih tepat ditangan pusat tetap di urus olehpemerintah pusat.
4. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapatsepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu daerah, sepertigeografi, keadaan, penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan ataulatar belakang sejarahnya.
5. Dari sudutkepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukankarena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

 Hakekat penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah dalam negara kesatuan, sesungguhnya didasarkan pada asas atau sistem desentralisasi, yakni pelimpahan/penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Pemerintah (pusat) kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebagai daerah otonom.[[8]](#footnote-8) Bahkan pandangan lain menyatakan bahwa pada mulanya pelimpahan wewenang kepada pejabat-pejabat bawahan (dari pemerintah sendiri) yang dikenal berdasarkan asas dekosentrasi, juga merupakan suatu sistem desentralisasi, yakni suatutindakan kebalikan dari sentralisasi.[[9]](#footnote-9)

**Pertumbuhan ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara selama periode waktu tertentu, yang umumnya diukur dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) riil.[[10]](#footnote-10) Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan pendapatan nasional dan daya beli masyarakat. Fungsi utama dari pertumbuhan ekonomi meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lebih banyak lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperbaiki standar hidup secara keseluruhan.[[11]](#footnote-11) Pertumbuhan ekonomi yang kuat memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan lebih banyak pendapatan dari pajak, yang kemudian dapat dialokasikan untuk investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik, karena dapat mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan memberikan harapan bagi peningkatan kondisi hidup di masa depan. Oleh karena itu, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi salah satu prioritas utama bagi pembuat kebijakan di berbagai negara, karena tanpa pertumbuhan yang memadai, tantangan ekonomi dan sosial cenderung semakin membesar.[[12]](#footnote-12)

**METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum terhadap aturan-aturan, norma, dan asas-asas hukum, termasuk pula doktrin-doktrin hukum yang berkembang dan relevan dengan tema penelitian. Menurut Soejono Soekonto penelitian hukum normatif diarahkan pada penelitian yang menarik asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembangunan ekonomi merujuk pada proses peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita suatu negara, yang juga memperhatikan pertambahan penduduk dan perubahan struktur ekonomi yang mendasar serta pemerataan pendapatan bagi penduduk. Otonomi daerah memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena implementasi yang baik dari otonomi daerah memungkinkan pembangunan dilakukan secara maksimal. Salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan di setiap daerah adalah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yang memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk membangun wilayahnya sendiri. [[13]](#footnote-13)

Dengan aturan tersebut, pemerintah di setiap daerah mengimplementasikan setiap perundangundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hasilnya, banyak daerah di seluruh Indonesia melakukan pemekaran wilayah dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas, jelas, dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menciptakan keseimbangan dalam tugas, fungsi, dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, setiap daerah perlu memiliki pendapatan yang mencukupi, serta sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desentralisasi adalah salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan negara, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi publik yang lebih demokratis dalam pengambilan keputusan. Melalui penerapan desentralisasi, wewenang akan dipindahkan ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk mengelola anggaran, memiliki kewenangan dalam pengumpulan pajak, membentuk dewan yang dipilih oleh masyarakat, memilih kepala daerah oleh DPRD, dan menerima bantuan berupa transfer dana dari Pemerintah Pusat. [[14]](#footnote-14)

Desentralisasi merupakan konsep yang kompleks dan melibatkan berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, termasuk aspek fiskal, politik, administrasi, serta pembangunan sosial dan ekonomi. Secara umum, desentralisasi terdiri dari beberapa jenis, antara lain Desentralisasi Politik yang berkaitan dengan penyerahan wewenang politik, Desentralisasi Administratif yang melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab administratif, Desentralisasi Fiskal yang berhubungan dengan pendelegasian kewenangan keuangan, dan Desentralisasi Ekonomi yang melibatkan penyerahan wewenang ekonomi atau pasar. [[15]](#footnote-15)

Melalui penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan potensi ekonomi di wilayahnya. Hal ini dapat berdampak positif terhadap peningkatan lapangan kerja, pendapatan per kapita, serta akses masyarakat terhadap layanan publik yang lebih baik. Pemerintah pusat juga memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah melalui kebijakan otonomi daerah, seperti pemberian alokasi dana perimbangan keuangan yang adil dan dukungan lainnya. Dengan demikian, otonomi daerah menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, di mana pemerintah daerah dapat mengelola sektor ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya, sementara pemerintah pusat memberikan dukungan yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah tersebut. [[16]](#footnote-16)

Hal ini juga di dukung dengan pendekatan literatur review yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah menjadi fokus utama pembangunan nasional selama beberapa dekade terakhir. Otonomi daerah, yang diberlakukan pada tahun 2001 melalui Undang-Undang No. 22/1999, diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien oleh pemerintah daerah. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara otonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. [[17]](#footnote-17)

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Fauzi & Sumner, (2019) menemukan bahwa otonomi daerah memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui peningkatan investasi dan pertumbuhan sektor swasta. Penelitian Aswicahyono & Hill, (2019) menemukan bahwa pemberian otonomi daerah yang lebih besar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini karena dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kendali yang lebih besar atas sumber daya dan kebijakan ekonomi di wilayahnya sendiri. Penelitian Widayat & Sugiharto, (2019) menemukan bahwa otonomi daerah dapat meningkatkan kinerja ekonomi daerah dalam jangka pendek, tetapi tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun demikian, mereka juga menemukan bahwa otonomi daerah dapat membantu mengurangi ketimpangan antar wilayah di Indonesia.

Penelitian Hidayat et al., (2020) menemukan bahwa pemberian otonomi daerah yang lebih besar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi hanya jika diiringi dengan pemberdayaan masyarakat setempat dan pengelolaan sumber daya yang baik. Otonomi daerah dapat membantu mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Pemberian otonomi daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kinerja ekonomi daerah dalam jangka pendek. Selain itu, pemberian otonomi daerah juga dapat membantu mengurangi ketimpangan dan kesenjangan antar wilayah di Indonesia, asalkan diiringi dengan pemberdayaan masyarakat setempat dan pengelolaan sumber daya yang baik.

Penelitian (Irawan et al., 2019) menemukan bahwa otonomi daerah tidak memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah yang kurang efektif dan efisien dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan dalam dampak otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di antara provinsi-provinsi di Indonesia. Penelitian Isfandiari et al., (2020) menunjukkan bahwa dampak otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung lebih positif di provinsi-provinsi dengan tingkat ketergantungan pada sektor pertanian yang lebih rendah. Kuncoro, (2004) menyatakan bahwa otonomi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya dijelaskan bahwa kendala struktural seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia dan lemahnya daya saing daerah menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

 Selain itu Hidayat & Anwar, (2017) yang mengkaji dampak otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi di Indonesia menemukan bahwa otonomi daerah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi tersebut. Penelitian Asra et al., (2019) menemukan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan daerah memiliki dampak positif pada hubungan antara otonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, literatur review juga menunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam dampak otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di antara sektor-sektor di Indonesia. Penelitian Pratomo, (2017) menunjukkan bahwa dampak otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung lebih positif di sektor-sektor non-pertanian, seperti industri dan jasa. Penelitian lain juga menunjukkan adanya dampak positif otonomi daerah terhadap pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Penelitian Suryadarma et al., (2019) menemukan bahwa otonomi daerah dapat membantu meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata dan mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata di beberapa provinsi di Indonesia.[[18]](#footnote-18)

Hubungan antara otonomi daerah dan pembangunan ekonomi di Indonesia sangat erat. Otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya dan potensi ekonomi di wilayAahnya. Implementasi yang baik dari otonomi daerah memungkinkan pembangunan ekonomi dilakukan secara maksimal dengan peningkatan lapangan kerja, pendapatan per kapita, dan akses masyarakat terhadap layanan publik yang lebih baik. Penerapan otonomi daerah dengan dukungan pemerintah pusat dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui pemanfaatan sumber daya dan potensi ekonomi secara efektif, pemerintah daerah dapat mengembangkan sektor ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Dalam hal ini, alokasi dana perimbangan yang adil dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. [[19]](#footnote-19)

Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah melalui kebijakan otonomi daerah. Langkah-langkah yang diambil termasuk restrukturisasi sistem perencanaan pembangunan nasional, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), alokasi dana perimbangan keuangan yang adil antara pusat dan daerah, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta prioritisasi program/proyek infrastruktur. Dengan demikian, otonomi daerah dan peran pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah saling terkait dan saling melengkapi. Melalui kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan ekonomi di Indonesia dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat di seluruh wilayah.

Dapat di simpulkan bahwa otonomi daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama ketika pemerintah daerah mampu melakukan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien.

**KESIMPULAN**

Otonomi daerah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, memungkinkan setiap daerah mengelola sumber daya dan potensi ekonominya secara mandiri. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya sendiri, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menciptakan keseimbangan tugas antara pusat dan daerah. Desentralisasi, sebagai strategi utama, mencakup pemindahan wewenang dalam pengelolaan anggaran, pengumpulan pajak, dan penerimaan bantuan dari pemerintah pusat. Penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat meningkatkan investasi, pertumbuhan sektor swasta, dan kinerja ekonomi daerah dalam jangka pendek, serta membantu mengurangi ketimpangan antar wilayah jika diiringi dengan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya yang baik. Namun, dampak positif otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi bervariasi antara sektor dan provinsi, dengan beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan ketergantungan rendah pada sektor pertanian menjadi faktor penentu keberhasilan. Oleh karena itu, otonomi daerah menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi, asalkan diimplementasikan secara efektif dan disertai dukungan yang memadai dari pemerintah pusat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aini, Dewi Nur., Ningsih, Putri Apria., Rahma, Sri. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jati Mulyo Tanjung Jabung Timur. Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi, Vol. 1, No. 1. <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JREA/article/view/177>

Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Law Reform, 15(1), 149–163.

Firdaus, M. (2018). Analisis Dampak Otonomi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan . *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 213–224.

Habibi, M. M. (2016). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(2).

Hutagalung, E. (2016). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 42(1), 1.

Nasution, A. H. (2016). Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia. Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan), 4(2), 206–215.

Pratomo, D. N. (2017). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Bina Praja, 9(1), 1–10.

Pangiuk, Ambok. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013. Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 2, No. 2. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam/article/view/160>

Pangiuk, Ambok. (2017). Pengaruh Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (Studi Tahun 2012-2015). Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 1, No. 1.

Putra, Lucky Febriansyah Putra., Mubiarto, Novi., Baining, Mellya Embun. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. J-ISACC (Journal Of Islamic Accounting Competency), Vol. 3, No. 2. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/jisacc/article/view/2024>

Yunus M., Mubyarto, Novi., Agustin, Robi Agustin. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi 2012-2019. Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 4. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v4i2.59>

Wenda, W. L., & Akib, H. (2015). Pembangunan ekonomi dalam era otonomi daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 5(1), 43–51.

AdriAn Sutedi, S.H.M.H. *Hukum Ekspor Impor*. Raih Asa Sukses, 2014. https://books.google.co.id/books?id=wzzeBgAAQBAJ.

Anjarwi, Astri Warih. *Pajak Lalu Lintas Barang*. Yogyakarta: Deepublish, t.t.

Astuti, wahyu Puji. *Ekspor dan Impor*. Semarang: Mutiara aksara, 2019.

Feryanto, Agung. *Mengenal Ekspor dan Impor*. Klaten: Cempaka Putih, 2018.

Risa, Mey. *Ekspor dan Impor*. Yogyakarta: Poliban Press, 2018.

Rusmawan, UUS. *Teknik Penulisan Tugas Akhir dan Skripsi Pemogaman*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, t.t.

Wau, Marselino, Leniwati, dan Jhon Firman Fau. *Teori Pertumbuhan Ekonomi )Kajian Konseptual dan Empirik)*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022.

**Jurnal:**

Fitriani, Efi. “Analisis pengaruh perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia.” *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen* 9, no. 1 (2019): 17–26.

Hanifah, Ulfa. “Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 2, no. 6 (2022): 107–26.

Himmati, Risdiana. “Analisis Pengaruh PDRB Sektor Industri, Nilai Ekspor Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2007-2014.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 2 (2016).

Hodijah, Siti, dan Grace Patricia Angelina. “Analisis pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 10, no. 01 (2021): 53–62.

Ikaningtyas, Maharani, Sonja Andarini, Annisa Cindy Maurina, dan Ilham Asta Pangestu. “Strategi dan Kebijakan Ekspor Impor atau Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 6 (2023): 160–65.

Isma, Asad, Dedi Purwana, dan Muchlis R.Luddin. “THE EFFECT OF VISIONARY LEADERSHIP, ORGANIZATIONAL BEHAVIOR, PERSUASIVE COMMUNICATION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON THE PROFESSIONALITY OF HONORARY EMPLOYEES.” *IJER - INDONESIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL REVIEW* 5, no. 1 (Juli 2018): 68–77. https://doi.org/10.21009/IJER.05.01.09.

Lestari, Asri, Aulia Zahra, Siti Zahra Khostamarul Aspia Lubis, dan Yudi Fakhrul Rozi. “Strategi Dan Kebijakan Ekspor Impor Atau Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.” *Jurnal Minfo Polgan* 12, no. 2 (2023): 2643–47.

Kusuma, Hendra, Fidanti Pramay Sheilla, dan Nazaruddin Malik. “Analisis pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi (Studi perbandingan Indonesia dan Thailand).” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Optimum* 10, no. 2 (2020): 140–52.

Maysarah, Siti, dan Hendra Ibrahim. “Strategi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Melalui Kebijakan Ekspor Impor Dalam Bisnis Internasional.” *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen* 3, no. 1 (2024): 62–69.

Mira, Mira, dan Subhechanis Saptanto. “PENGARUH KEBIJAKAN PERUBAHAN TARIF IMPOR TERHADAP KINERJA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.” *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 7, no. 1 (15 Januari 2018): 13. https://doi.org/10.15578/jksekp.v7i1.5745.

Muhammad Adnan, Yulindawati, dan Mifda Fernandi. “Pengaruh Ekspor dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.” *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 2 (16 Mei 2022): 1–17. https://doi.org/10.22373/jibes.v1i2.1771.

Nurdani, Alya S, dan Devy M Puspitasari. “Pengaruh ekspor impor terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009–2019 di Indonesia.” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 8 (2023): 3450–55.

Rusliani, Hansen. “Ekonomi syari’ah solusi dalam menghadapi krisis moneter (perbandingan Malaysia–Indonesia).” *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah* 10, no. 2 (2018): 199–214.

Rusliani, Hansen. “Kebijakan Muamalah Pemerintah Indonesia terhadap Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia sebagai Modal Pembangunan Ekonomi.” *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 30, no. 2 (2015): 146371.

Siregar, Erwin Saputra, Suchi Soumi Shinta, dan Abd Malik. “PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH: ANALISIS DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP MUARA BULIAN.” *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (23 Desember 2021): 115–31. https://doi.org/10.52490/attijarah.v3i2.141.

Subekti, Adnan, Muhammad Tahir, Mursyid, dan M. Nazori. “THE EFFECT OF INVESTMENT, GOVERNMENT EXPENDITURE, AND ZAKAT ON JOB OPPORTUNITY WITH ECONOMIC GROWTH AS INTERVENING VARIABLES.” *Journal of Southwest Jiaotong University* 57, no. 3 (30 Juni 2022): 102–12. https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.3.9.

Suhairi, Suhairi, Asri Lestari, Aulia Zahra, Siti Zahra Khostamarul Aspia Lubis, dan Yudi Fakhrul Rozi. “Strategi Dan Kebijakan Ekspor Impor Atau Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.” *Jurnal Minfo Polgan* 12, no. 2 (2 Januari 2024): 2643–47. https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13342.

Am, S., & Harun, H. (2023). *Determining Qibla Direction of Mosques in Jambi Province : Method , Conflict , and Resolution*. *01*(01), 166–186.

Arrahman, A., & Yanti, I. (2022). Halal Industry in Javanese Culture; Yogyakarta Regional Government Policy in obtaining its economic values. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *16*(1), 151–174. https://doi.org/10.18326/infsl3.v16i1.151-174

As’ad, A., & Firmansyah, F. (2022). A New Paradigm on Human Resources Management in State Islamic University. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, *14*(1), 71–84. https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1513

As’ad, A., Fridiyanto, F., & Rafi’i, M. (2021). The Battle of Student Ideology at State Islamic Higher Education: Activism of Gerakan Mahasiswa Pembebasan and Student Element Resistance. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, *25*(1), 75. https://doi.org/10.29300/madania.v25i1.4493

As’ad, Putra, D. I. A., & Arfan. (2021). Being al-wasatiyah agents: The role of azharite organization in the moderation of Indonesian religious constellation. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, *11*(2), 124–145. https://doi.org/10.32350/jitc.11.2.07

As’ad, Rahmat Basuki, F., Fridiyanto, & Suryanti, K. (2021). Konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal di Lubuk Beringin dalam perspektif agama, manajemen, dan sains. *Kontekstualita: Jurnal Sosial Keagamaan*, *36*(1), 89–108. https://doi.org/10.30631/kontekstualita.36.1.89-108

Asad, A. (2021). From Bureaucratic-Centralism Management to School Based Management: Managing Human Resources in the Management of Education Program. *Indonesian Research Journal in Education |IRJE|*, *5*(1), 201–225. https://doi.org/10.22437/irje.v5i1.12947

Hardi, E. A. (2021). *MUSLIM YOUTH AND PHILANTROPHIC ACTIVISM The Case of Tangan Recehan and Griya Derma*, *16(1)* 15–29. https://doi.org/10.21274/epis.2021.16.1.15-29

Hardi, E. A., Masnidar, M., & Anita, E. (2022). Philanthropy and Sustainable Compassion: An Evidence of Charity Activism in Alumni Association of Islamic Boarding School. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *15*(2), 337–360. https://doi.org/10.18326/infsl3.v15i2.337-360

Indrawan, B., Nurmita, N., Nengsih, T. A., Utami, W., Nasrudin, D., Tanti, T., Deliza, D., Ferawati, R., Syafitri, R., & Santoso, P. (2022). The Influence of Attitude and Need for Cognition on Student’s Purchase Intention Behavior on Halal Food: Schools Clustering Perspective. *Indonesian Journal of Halal Research*, *4*(1), 26–34. https://doi.org/10.15575/ijhar.v4i1.13092

Indrawan, B., Susanti, E., Utami, W., Deliza, D., Tanti, T., & Ferawati, R. (2022). *Covid-19 and Sustainable Economic: How Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sharing and Empowering Society*. https://doi.org/10.4108/eai.20-10-2021.2316372

Nengsih, T. A. (2021). Jambi Province Economic Growth using Principal Component Regression in Islamic Economic Perspective. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *36*(01). http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/Kontekstualita%0A

Nengsih, T. A., Abduh, M., Ladini, U., & Mubarak, F. (2023). The Impact of Islamic Financial Development, GDP, and Population on Environmental Quality in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, *13*(1), 7–13. https://doi.org/10.32479/ijeep.13727

Nengsih, T. A., Bertrand, F., Maumy-Bertrand, M., & Meyer, N. (2019). Determining the number of components in PLS regression on incomplete data set. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, *November*. https://doi.org/10.1515/sagmb-2018-0059

Nengsih, T. A., Nofrianto, N., Rosmanidar, E., & Uriawan, W. (2021). Corporate Social Responsibility on Image and Trust of Bank Syariah Mandiri. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *13*(1), 151–170. https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.18347

Putra, D. . A., & Addiarrahman, A. (2023). Quranic Exegesis Journalism in Islamic Magazines in Indonesia Between 1970-1980. *Journal of Indonesian Islam*, *17*(2), 483. https://doi.org/10.15642/jiis.2023.17.2.483-509

Rafidah, R. (2023). Indonesian islamic bank return on assets analysis: Moderating effect of musyarakah financing. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, *7(2)*, 200–216. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/20310%0Ahttps://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/download/20310/10813

Rosmanidar, E., Ahsan, M., Al-Hadi, A. A., & Thi Minh Phuong, N. (2022). Is It Fair To Assess the Performance of Islamic Banks Based on the Conventional Bank Platform? *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, *23*(1), 1–21. https://doi.org/10.18860/ua.v23i1.15473

Rosmanidar, E., Hadi, A. A. Al, & Ahsan, M. (2021). Islamic Banking Performance Measurement: a Conceptual Review of Two Decades. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, *5*(1), 16–33. https://doi.org/10.46281/ijibfr.v5i1.1056

Saiin, A., Umar, M. H., Badarussyamsi, Hajazi, M. Z., & Yusuf, M. (2023). THE DOMINATION OF ISLAMIC LAW IN CUSTOMARY MATRIMONIAL CEREMONIES Islamic Values within the Malay Marriage Tradition in Kepulauan Riau. *Al-Ahwal*, *16*(2), 320–341. https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16207

Sholihin, M., Shalihin, N., & Addiarrahman. (2023). the Scale of Muslims’ Consumption Intelligence: a Maqāṣid Insight. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *15*(2), 98–118. https://doi.org/10.55188/ijif.v15i2.544

Subekti, A., Tahir, M., Mursyid, & Nazori, M. (2022). the Effect of Investment, Government Expenditure, and Zakat on Job Opportunity With Economic Growth As Intervening Variables. *Journal of Southwest Jiaotong University*, *57*(3), 102–112. https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.3.9

Umar, M., & Sukarno, S. (2022). The influence of fiqh insights and science literacy on student ability in developing Quran-based science. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, *11*(2), 954–962. https://doi.org/10.11591/ijere.v11i2.22012

Usdeldi, Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2021). Meta Synthesis of GCG, SSB, and CSR On Islamic banking, performance and financial innovations. *Iqtishadia*, *14*(1), 1–25. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ejlQBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=islamic+economics&ots=3S7cdvFBox&sig=FmbOIiOg3DIqJettaNLcung\_d2U

Usdeldi, U., Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2022). The Mediate Effect Of Sharia Compliance on The Performance of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *26*(1), 247–264. https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i1.6158

Willyandari, N. O., Rosmanidar, E., & Safitri, Y. (2024). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Jasa Transportasi pada Indeks Saham Syariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(1), 11422-11432.* [*https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14099*](https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14099)

Pertiwi, M. E., Nengsih, T. A., & Safitri, Y., Ramli, F. (2024). DAMPAK RELOKASI PASAR TRADISIONAL TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG (STUDI KASUS DI PASAR RAKYAT TALANG BANJAR KECAMATAN JAMBI TIMUR). *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, EKONOMI DAN BISNIS*, 3(1), 112-135. https://doi.org/10.51903/jimeb.v2i1

Safitri, Y., Ramli, F., & Mawaddah, F. (2023).[IMPLEMENTATION OF THE HOPE FAMILY PROGRAM IN INCREASING COMMUNITY WELFARE IN SHARIA ECONOMIC PERSPECTIVE](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=cgrY5j4AAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=cgrY5j4AAAAJ:zYLM7Y9cAGgC). Sustainability: Theory, Practice and Policy, 1(1), 68-80. <https://doi.org/10.30631/sdgs.v1i1.1840>

Ramli, F., & Safitri, Y. (2022). Analysis of the Effect of Natural Resources on the Quality of Human Development through Jambi Province Capital Expenditures. Sustainability: Theory, Practice and Policy, 2(2), 111-222. <https://doi.org/10.30631/sdgs.v2i2.1454>

Nurhayati, N., Rosmanidar, E., & Ramli, F. (2024). Pengaruh Jumlah Produksi, Biaya Produksi dan Etos Kerja Islam Terhadap Pendapatan Petani Karet di Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu. *eCoa-Buss, 6(3),* 1315-1327. https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1179

Putri, A., Baining, M. E., & Ramli, F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Mahasiswa Menjadi Enterpreneur Syariah. *JMPAI: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 2(30, 35-54. https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i2.211

Martaliah, Nurfitri,, Anita, Efni., Rahman, Fuad, & Naufal ramli, Luthfi (2023). *Pengaruh Penyaluran Dana Zakat dan IPMTerhadap Kemiskinandi Provinsi Jambi Periode2010-2021*. IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business Volume 8, Number2, December 2023, 334-344. E\_ISSN: 2540-9506 P\_ISSN: 2540-9514http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb

Yudana, T., & Martaliah, N. (2020). Pendayagunaan Zakat untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Banuayu Bangun Rejo, Sumatera Selatan. KONTEKSTUALITA P-ISSN: 1979-598X Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan E-ISSN: 2548-1770 Vol. 35 No. 1, Juni 2020 DOI: 10.30631/35.1.55-64

Kurniawan Dandi, Mubyarto Novi & Rohana Rohana. 2024  *Analisis Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi CV Rimbo Jaya Desa Perintis Makmur Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, ANWARUL Jurnal Pendidikan dan Dakwah,* [*https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i2.2832*](https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i2.2832)

Farhan Hamudi, Ahsan Putra Hafidz, Nova Erliyana, 2023. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Aurduri Kota Jambi. Jurnal Publikasi Manajemen Informatika (JUPUMI) Vol.2, No.3 September 2023 E-ISSN : 2808-9014, P-ISSN 2808-9359, DOI: <https://doi.org/10.55606/jupumi.v2i3.2153>

Siddiqi, M., Prayogo, Youdhi & Martaliah, Nurfitri, 2023 *Pengaruh Literasi, Edukasi Dan Self Efficacy Terhadap Keputusan Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa Febi Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).*Journal of Student Research (JSR) Vol.1, No.5 September 2023 e-ISSN: 2963-9697; p-ISSN: 2963-9859, Hal 213-234 DOI: <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i5>

Rahmah, M., Kurniawan, B., & Rohana, R. (2024). PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL, INVESTASI, DAN PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAMBI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 774-786. https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1650

Ardiansyah, M. Z., Anita, E., & Rohana, R. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Usaha dan Strategi Pemasaran Syariah terhadap Pendapatan pada Usaha Kukus Bungkus Official Kota Jambi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 18728-18737. https://doi.org/10.31004/jptam.v8i2.15129

Judijanto, L., Utami, E. Y., Sudarmanto, E., Erliyana, N., & Said, S. (2024). The Effect of Regional Financial Networks on Banking System Stability in Indonesia: A Literature Review of Linkages, Risks, and Impacts in a Macroeconomic Context. Sciences du Nord Economics and Business, 1(01), 26-32. https://north-press.com/index.php/sneb

Zakaria, Z., Saiful, N. A. Q., Santoso, Ekbal., Erliyana, N., & Utami, E. Y. (2023) THE INFLUENCE OF LIFESTYLE, PRICE, BRAND IMAGE, PACKAGING QUALITY AND PRODUCT QUALITY ON PURCHASE INTEREST OF STARBUCKS CANNED PRODUCTS CUSTOMERS. *JURNAL SCIENTIA*, 12(3), 3961-3966. https://doi.org/10.58471/scientia.v12i03.1825

Erliyana, N., & Alawiyah, R. (2022). Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah Pada Masyarakat RT. 28 Kelurahan Kenali Asam Bawah Jambi. *COMMUNIO:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 102-106. https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jpkm/article/view/34*

Pangindaran, D. P., Ningsih, P. A., & Rohana, R. (2024). PENGARUH HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MELALUI APLIKASI TIKTOK SHOP PADA MAHASISWA UIN STS JAMBI TAHUN 2023. *Jkpim : Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(1), 59-73. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i1.274>

Qutni, M. D., Miftah, A. A., & Martaliah, N. (2024). KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN (MUKHABARAH) DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KERTOPATI. *Jkpim : Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(1), 246-260. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i1.348>

1. Firdaus, M. (2018). Analisis Dampak Otonomi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan . *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(3), Hal 213 [↑](#footnote-ref-1)
2. Habibi, M. M. (2016). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(2). Hal 14 [↑](#footnote-ref-2)
3. Hutagalung, E. (2016). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 42(1). Hal 31 [↑](#footnote-ref-3)
4. Nasution, A. H. (2016). Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia. Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan), 4(2), Hal 209 [↑](#footnote-ref-4)
5. Pratomo, D. N. (2017). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Bina Praja, 9(1), Hal 6 [↑](#footnote-ref-5)
6. Wenda, W. L., & Akib, H. (2015). Pembangunan ekonomi dalam era otonomi daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 5(1), Hal 43 [↑](#footnote-ref-6)
7. Pratomo, D. N. (2017). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Bina Praja, 9(1), Hal 6 [↑](#footnote-ref-7)
8. Aini, Dewi Nur., Ningsih, Putri Apria., Rahma, Sri. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jati Mulyo Tanjung Jabung Timur. Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi, Vol. 1, No. 1. <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JREA/article/view/177> [↑](#footnote-ref-8)
9. Pangiuk, Ambok. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013. Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 2, No. 2. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam/article/view/160> Hal 65 [↑](#footnote-ref-9)
10. Yunus M., Mubyarto, Novi., Agustin, Robi Agustin. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi 2012-2019. Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 4. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v4i2.59> [↑](#footnote-ref-10)
11. Putra, Lucky Febriansyah Putra., Mubiarto, Novi., Baining, Mellya Embun. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. J-ISACC (Journal Of Islamic Accounting Competency), Vol. 3, No. 2. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/jisacc/article/view/2024> Hal 76 [↑](#footnote-ref-11)
12. [↑](#footnote-ref-12)
13. [↑](#footnote-ref-13)
14. Putra, Lucky Febriansyah Putra., Mubiarto, Novi., Baining, Mellya Embun. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. J-ISACC (Journal Of Islamic Accounting Competency), Vol. 3, No. 2. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/jisacc/article/view/2024> Hal 90 [↑](#footnote-ref-14)
15. Pangiuk, Ambok. (2017). Pengaruh Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (Studi Tahun 2012-2015). Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 1, No. 1. Hal 43 [↑](#footnote-ref-15)
16. Firdaus, M. (2018). Analisis Dampak Otonomi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan . *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(3), Hal 213 [↑](#footnote-ref-16)
17. Yunus M., Mubyarto, Novi., Agustin, Robi Agustin. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi 2012-2019. Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 4. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v4i2.59> . Hal 87 [↑](#footnote-ref-17)
18. Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Law Reform, 15(1), Hal 148 [↑](#footnote-ref-18)
19. Pangiuk, Ambok. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013. Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 2, No. 2. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam/article/view/160> Hal 54 [↑](#footnote-ref-19)